

KLIPING BERITA

Sumber : Lombok Post

22 Mei 2023

Bima - Dompnu

Jadi Temuan BPK NTB, Pengelolaan Anggaran RSUD Sondosia Diduga Bermasalah

Editor: Galih Mps  22 Mei 2023



JADI TEMUAN BPK: Pengelolaan anggaran RSUD Sondosia tahun 2022 menjadi temuan BPK NTB. (DOK/LOMBOK POST)

BIMA-Pengelolaan keuangan di RSUD Sondosia menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB. Mulai dari anggaran pembelanjaan hingga pertanggungjawaban.

Untuk tahun 2022, RSUD Sondosia memperoleh pendapatan dari pasien umum, klaim pasien BPJS, dan klaim pasien covid-19. Hasil pemeriksaan atas pendapatan dan belanja RSUD Sondosia diketahui bendahara penerima dan bendahara pengeluaran belanja dana klaim BPJS dan dana klaim covid tidak didukung dengan surat ketetapan Bupati Bima.

Pendapatan pelayanan Kesehatan tahun 2022 telat disetor ke kas daerah senilai Rp 60.477.500 dan penggunaan langsung atas pendapatan RSUD Sondosia dari pasien umum, hasil klaim dari BPJS, dan covid senilai Rp 3.529.479.656 tidak dikelola dalam mekanisme APBD.

Pada tahun 2022 RSUD Sondosia yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memperoleh pendapatan Rp 5.084.089.956. Dengan rincian, pelayanan yang diberikan kepada pasien umum Rp 425.372.650, klaim pasien BPJS Rp 1.514.461.300 dan pasien covid Rp 3.117.256.006 miliar.

Hasil pemeriksaan tim BPK NTB terhadap dokumen penerimaan, rekening bank, dan keterangan dari bendahara penerima maupun pengeluaran diketahui terdapat penggunaan langsung terhadap pendapatan yang diterima senilai Rp 3.529.479.656.

Berdasarkan temuan BPK NTB, dari jumlah penggunaan langsung pendapatan pasien umum Rp 337.223.650, di antaranya digunakan untuk belanja pegawai dan jasa pelayanan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung senilai Rp 173.622.000. Lalu belanja operasional (ATK dan obat-obatan) Rp 163.601.650. Sedangkan sisanya Rp 88.149.000 disetorkan ke kas daerah.

"Penggunaan langsung dana senilai Rp 173.622.000 juta hanya didasarkan pada kesepakatan bersama seluruh pegawai yang diputuskan Direktur secara lisan tanpa ada ketetapan dari bupati," sebut BPK dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bima tahun 2022.

Sementara, pendapatan klaim pasien BPJS senilai Rp 1.514.461.300 telah disetorkan ke kas daerah Rp 1.316.510.700. Sedangkan sisanya digunakan langsung untuk belanja operasional Rp 75 juta dan Rp 149.950.600 masih tercatat pada saldo rekening bank BSI.

Bendahara pengeluaran juga telah menerima dan menarik keseluruhan pendapatan klaim covid dari rekening bank BNI milik RSUD Sondosia senilai Rp 3.117.256.006. Menurut penjelasan bendahara pengeluaran, keseluruhan pendapatan tersebut telah digunakan langsung untuk jasa pelayanan tenaga Kesehatan dan pendukung kepada pegawai RSUD Sondosia.

Penggunaan dana tersebut hanya didasarkan kepada kesepakatan bersama seluruh pegawai yang diputuskan direktur tanpa mengikuti ketetapan kepala daerah terkait besaran pembagian jasa kesehatan klaim covid.

Bendahara pengeluaran tidak dapat menunjukkan dokumen dasar perhitungan pembagian besaran masing-masing jasa kesehatan yang diperuntukan seluruh pegawai. *Nah*, pengeluaran tersebut belum didukung oleh bukti pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Bima dari penggunaan langsung dana Rp 3.117.256.006, di antaranya digunakan untuk membayar tenaga Kesehatan jasa pelayanan klaim covid Rp 2.917.665.152.

Pemberian jasa pelayanan umum kesehatan klaim BPJS tidak sesuai dengan ketentuan. Hasil perbandingan alokasi jasa pelayanan menurut keputusan Bupati Bima dengan realisasi terdapat kelebihan pembayaran jasa pelayanan Rp 137.985.518 dan kekurangan Rp 91.885.280 kepada beberapa tenaga Kesehatan. Selain itu, terdapat beberapa tenaga kesehatan yang belum menerima jasa pelayanan kesehatan Rp 46.100.238.

Terhadap temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Direktur RSUD Sondosia menyalurkan jasa pelayanan kepada para tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, BPK juga meminta Inspektorat Kabupaten Bima agar melakukan pemeriksaan atas keabsahan dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban penggunaan langsung dana tersebut dan menyetorkan kembali ke kas daerah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BPK juga meminta agar memberikan sanksi kepada bendahara penerima dan bendahara pengeluaran yang tidak mencatatkan dan membuat bukti terhadap pertanggungjawaban dana penerimaan dan pengeluaran.

Direktur RSUD Sondosia dr Firman enggan memberikan penjelasan atas temuan tim BPK NTB itu. "Ini adalah hasil pemeriksaan BPK atas anggaran 2022, sedangkan saya baru masuk RSUD Sondosia 2023," kelitnya.

Menurut dia, penjelasan kaitan dengan temuan BPK tersebut lebih tepat dikonfirmasi kepada BPK langsung. "Sebagai direktur, saya membantu memfasilitasi apa yang diperlukan," imbuhnya. **(man/r8)**